

---

LAPORAN TAHUNAN  
2001 - 2002

---



demokrasi adalah kata kerja

BAHASA INDONESIA



## Sepatah Kata dari Direktur Eksekutif

**B**ercermin pada realitas keseharian, kita barangkali bisa mengurut dada melihat perilaku elit politik dan kalangan birokrasi yang terkesan buta dan tuli terhadap tuntutan demokratisasi yang menjadi roh reformasi. Alih-alih mempraktekan demokrasi, mereka justru mempertontonkan perilaku yang tak jauh berbeda dengan sebelum reformasi bergulir. Korupsi terus terjadi, penegakan hukum jalan di tempat dan DPR sibuk membangun kesepakatan-kesepakatan politik secara tertutup adalah beberapa contoh yang bisa dimunculkan. Repotnya, hanya dengan mengharap kesadaran mereka, sulit rasanya praktek-praktek demokrasi dapat terwujud, karena yang ada di kepala mereka hanyalah berusaha memenuhi kepentingan pragmatis mereka dalam rentang waktu jabatan yang dipegang. Oleh karena itu, semua komponen masyarakat sipil perlu meningkatkan kepeduliaannya, bahkan berperan aktif dalam mendorong praktek-praktek demokrasi. Tanpa dorongan yang terus menerus dari kalangan masyarakat sipil, para penyelenggara negara akan lupa dengan sendirinya atau bahkan sengaja melupakan praktek-praktek demokrasi dalam aktivitas penyelenggaraan negara yang mereka lakukan.

Dalam kerangka itulah maka berbagai kegiatan Yappika selama periode 2001-2002 ini kami arahkan untuk mendorong terciptanya demokrasi dalam praktek yang sesungguhnya. Misalnya saja, kami membuat satu alat untuk menakar sejauhmana otonomi daerah memberikan respon bagi masalah-masalah yang dihadapi komunitas setempat. Alat takar ini kami harapkan bisa menjadi sarana bagi semua pihak untuk taat asas, pada apa yang kita maksudkan dengan praktek-praktek yang demokratis, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat sipil itu sendiri. Dalam



Lili Hasanuddin  
*Direktur Eksekutif*

bentuk lain, Yappika juga mendorong terjadinya kohesi antar kelompok masyarakat sipil melalui berbagai pembentukan koalisi yang mengkampanyekan pentingnya demokrasi dipraktekkan. Salah satunya sebagai tindak lanjut sekaligus belajar dari pengalaman advokasi UU Yayasan maka dibentuklah Koalisi Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TCP3) atau *Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Partisipatif* yang bertujuan agar ada jaminan hukum bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam perumusan dan pembuatan undang-undang. Dalam membangun negara yang demokratis, kami tidak ingin pembuatan kebijakan hanya menjadi *hak dan tanggungjawab* dari kalangan pemerintah semata.

Di tingkat lokal, selain terus mempersiapkan kelembagaan masyarakat dan pengetahuan-pengetahuan dasar bagi peningkatan daya kritis masyarakat, Yappika juga mendukung inisiatif mitranya untuk melakukan pemantauan kinerja pemerintah daerah agar tidak terjadi lagi praktek-praktek korupsi dan ketertutupan informasi. Tujuannya agar semua hal yang menyangkut kepentingan publik menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga terus mendukung mitra-mitra yang bekerja untuk resolusi konflik dengan harapan terjadinya rekonsiliasi sosial di tingkat masyarakat bawah, sebagai pra-syarat terciptanya iklim yang kondusif dalam menggulirkan praktek-praktek demokrasi.

Melalui laporan tahunan ini, beberapa capaian atas aktivitas tersebut kami sajikan. Sudah barang tentu apa yang kami peroleh masih perlu penajaman lagi disana-sini. Untuk itulah kami mengundang keterlibatan berbagai pihak dalam segala aktivitas Yappika. Kami sangat terbuka bekerjasama dengan pihak-pihak manapun. Yappika percaya bekerja bersama rakyat adalah kunci untuk mewujudkan masyarakat sipil yang kuat, adil, mandiri, menghargai pularisme, setara dan demokratis.

Lili Hasanuddin

## Demokrasi ... Adalah Sebuah Kata Kerja

**D**emokrasi bukanlah kata-kata tanpa makna, yang cuma jadi penghias dinding atau pemulas dokumen penting yang disimpan dalam almari kaca. Bukan pula cuma urusan pemilu dan partai politik saja. Demokrasi butuh praktek, karena kelahirannya berawal dari proses yang bisa saja panjang dan berliku --- untuk menemukan keseimbangan antara kekuasaan -dan- tanggung-jawab; antara efisiensi pengambilan keputusan -dengan- pemberian kesempatan para-pihak untuk berpartisipasi; antara kehendak untuk memenuhi kepentingan kita dengan- pemenuhan kebutuhan bersama secara adil dan berkesinambungan. Jelas tidak mudah, butuh pengendalian diri, butuh pikiran yang waras dalam melihat ke sekeliling, pun butuh sikap yang bijak tak hanya berkuat dengan diri sendiri dan memikirkan kepentingan pribadi.

Kalau sudah mendengar kata bijak dan kendali diri... orang lantas berpikir bahwa usia dan pengalamanlah yang menentukan tingkat kebijakan dan kendali diri. Benar begitu? Belum tentu! Walau belum ada riset ilmiah yang bisa membuktikan, kami bisa katakan bahwa tidak ada asumsi baku yang menyatakan adanya hubungan linear antara usia dengan wicaksana. Karenanya, demokrasi bisa tumbuh dimana saja... di halaman belakang kita ketika anak-anak bermain dan berbagi dengan manisnya ... di sudut-sudut jembatan kota, ketika beberapa orang pengemis bercerita tentang pengalaman mereka sambil berbagi nasi bungkus dan mendiskusikan pembagian wilayah kerja yang adil untuk esok harinya .... di pelataran taman kota ketika para warga segala usia berolah-raga bersama, berbagi instruktur, ruang dan udara agar "sehat" jadi milik bersama.



Kesempatan untuk saling mengeluarkan pendapat dalam rapat staff

Pada tataran individual, banyak hal bisa dilakukan untuk mengisi demokrasi kita. Dengan bersikap jujur, punya integritas, dan adil pada sesama, bahkan pada bawahan dan anak-anak, kita sudah berdemokrasi. Memberi kesempatan pada istri atau kawan untuk berpendapat, bergotong-royong sembari berbagi tanggung-jawab untuk membersihkan taman RW, pemilihan RT yang partisipatif, dan laporan bulanan yang disampaikan RT kita berisi pertanggungjawaban dana-dana yang dia terima beserta penggunaannya pun contoh konkrit demokrasi. Bayangkan... kalau hal-hal yang kecil positif yang melingkupi keseharian kita itu, dipraktekkan dalam lingkup negara! Bukankah amat besar sumbangan kita?

Jadi, demokrasi tak harus berarti tatanan kenegaraan yang rumit, penuh intrik, dan menjadi topik bahasan

konseptual/paradigmatis yang harus dipelajari lewat buku-buku teks tebal di perpustakaan kota. Demokrasi harus dipraktekkan! Demokrasi adalah proses, untuk mencari keseimbangan relasi antara kekuasaan - tanggung jawab kontrol akses keadilan, lewat kesinambungan aksi-refleksi-aksi. Setidaknya, itulah inti demokrasi bagi kami, sebagai lembaga yang relatif muda yang mencoba meniti karir mengusung isu demokrasi lewat kerja-kerja praktis.

Bagaimana mempraktekkan demokrasi dalam keseharian manajemen organisasi kami? Yang pertama adalah memaknai pertanggung-jawaban publik, sebagai sebuah kemutlakan. Laporan Tahunan ini merupakan bukti, akan kehendak kami bersikap transparan sembari mempertanggungjawabkan sejumlah dana dan kontribusi jenis lain yang kami terima dari berbagai sumber, melalui uraian hasil-hasil kerja. Yang kedua adalah memberlakukan sebuah proses aksi-refleksi-aksi secara berkala, dengan partisipasi aktif mitra-mitra dan penerima manfaat atas kehadiran Yappika untuk memberikan komentar, kritik, saran-saran perbaikan, dan bahkan ultimatum, bila kami tak juga berbenah diri. Bagaimanapun, Yappika ada karena adanya kebutuhan di sekeliling kita... dan keberhasilan Yappika ditentukan pula oleh tingkat kepuasan para mitra dan penerima manfaat itu, terhadap pelayanan yang kami berikan.

Tataran ketiga bisa ditemui dalam aturan-aturan keorganisasian, yang proses pembuatannya dilakukan dengan musyawarah, mencari kesepakatan antar staf Yappika dan antara staf dengan pengurus. Sebuah organisasi bisa berfungsi maksimal, bila karyawan bekerja optimal. Dan optimasi kerja serta pemikiran itu, tumbuh dan berkembang dengan subur bila ada kebersamaan

*“Yappika berperan sangat besar terhadap perkembangan mitranya,”* itu adalah tanggapan saya pertama sekali jika ditanya apa peran Yappika dalam lembaga kami. Awal perjalanan Hivlak dimulai dengan kemitraan bersama Yappika. Berkat dukungan, pendampingan, pelatihan-pelatihan serta magang yang dilakukan oleh Yappika kepada mitra-mitranya, Hivlak sebagai salah satu mitra Yappika saat ini dipercayai dan diakui oleh masyarakat Kei. Kini Hivlak juga sudah diperhitungkan untuk kegiatan advokasi di tingkat nasional. Ikut terlibat dan menjadi anggota-anggota berbagai jaringan Nasional, diantaranya menjadi anggota Jaring Pela.

Berkat Yappika juga Hivlak dapat membina jaringan dengan NGO-NGO di berbagai daerah, berkenalan dan berbagi pengalaman melalui studi banding dan magang di berbagai lembaga. Disamping itu Yappika berperan sangat besar mendorong peningkatan kapasitas untuk Hivlak terutama bagi staf-staf Hivlak. Terus terang Hivlak ibarat sekuntum kembang yang sedang harum karena fasilitasi dan dampingan dari Yappika.

Yos R. Retobjaan  
Direktur Hivlak Tual  
Maluku Tenggara



Kerjasama dalam praktek demokrasi menjadi suatu keharusan

dan perasaan kesaling-tergantungan. Pembuatan aturan, etika kerja bersama, melalui proses aksi-refleksi-aksi itu, telah menumbuhkan ikatan kuat antara karyawan dengan organisasi yang menaunginya dan menjadi tempatnya berkiprah.

Yang keempat, adalah proses pergantian kepemimpinan yang transparan dan berkala. Legalitas hukum Yappika adalah sebuah Yayasan, di mana pimpinan eksekutif dipilih oleh Dewan Pengurus atas dasar profesionalitas. Pimpinan eksekutif bisa terus memegang posisinya tanpa batasan waktu, selama menunjukkan prestasi sesuai harapan pengurus. Namun organisasi ini tak hendak berhenti sampai pada tataran legal saja. Baru-baru ini, atas dasar permintaan pimpinan eksekutif dan dengan dukungan seluruh staf, Yappika melakukan rotasi kepemimpinan. Rotasi ini dilakukan, agar bertumbuh jiwa-jiwa pemimpin dalam seluruh jajaran organisasi, pun memberikan angin segar bagi maraknya gagasan-gagasan baru. Disisi lain, organisasi tak kehilangan sumber daya, yang mampu berkontribusi untuk pengembangan wacana dan pengguliran praktek demokrasi.

Sebuah pepatah mengatakan, seorang pemimpin tulen punya cukup kebesaran hati untuk mengaca pada kekurangan diri dan berbagi kekuatan yang dimiliki. Yappika tak segan melakukan refleksi, mengakui dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang kami miliki, dan berbenah diri .... agar usaha-usaha yang kami lakukan ... bisa jadi air dan pupuk ... yang menyirami bumi dan menyemarakkan tunas-tunas demokrasi dipelbagai penjuru pertiwi. Demokrasi adalah sebuah kerja.... yang perlu terus menerus diasah, diasuh dan dibenahi sebagai bagian dari keseharian kita.

## Program-Program Yappika: Pendekatan yang Holistik terhadap "Pemberdayaan"

**H**akikat demokrasi tertumpu pada partisipasi rakyat yang meluas dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan-kebijakan publik. Demokrasi akan bermakna bila kehadirannya mampu menjamin kesetaraan bagi seluruh rakyat dimata hukum dan peradilan, kesetaraan akan akses ke dan kontrol terhadap penciptaan peluang-peluang ekonomi, politik dan pelayanan publik, sekaligus memberi jaminan pengakuan dan penghargaan terhadap hak azasi manusia dan keberagaman. Perbaikan dan perubahan pada seluruh tataran itulah yang sedang diusahakan oleh Yappika, melalui penguatan pada sektor masyarakat sipil.

Tugas itu tentu amat besar dan luas bagi sebuah organisasi semacam Yappika. Oleh karenanya, kami mencoba mengantisipasi dengan menyiapkan pendekatan yang holistik, melalui 4 pilar utama strategi program, yakni : kampanye publik, advokasi, dukungan-dukungan untuk pemberdayaan rakyat, dan penyempurnaan sistem pendukung ketiga strategi itu yang terdiri dari riset-riset, diseminasi informasi, pembuatan penerbitan-penerbitan buku bermutu, pengembangan jaringan, serta penyiapan aktivitas-aktivitas untuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan.

Kampanye publik menjadi salah satu media bagi kami untuk melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat luas tentang berbagai persoalan mendasar yang perlu dibenahi dinegara ini, disertai himbauan untuk turut berpartisipasi mengatasi problem itu. Tidak ada sebuah perubahan yang bisa terjadi tanpa partisipasi aktif warga-negara, dan sekecil apapun kontribusi anda sebagai warga akan amat bermakna untuk mendorong penyempurnaan tatanan bermasyarakat dan bernegara. Melalui kampanye publik ini, Yappika berharap memperoleh dukungan dari konstituen utamanya, rakyat Indonesia, dalam rangka menggulirkan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam pengembangan demokrasi Indonesia

Advokasi menjadi strategi yang tak kalah penting dengan kesadaran bahwa perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan amat diperlukan untuk menyokong keberhasilan penegakan hukum, memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif terhadap penyelenggaraan negara, dan untuk menjamin partisipasi warga-negara atas pengambilan keputusan-keputusan negara yang berdampak pada kehidupan mereka. Advokasi dalam rangka mendorong perubahan kebijakan dan peraturan perundangan ini dilakukan bersama organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat sipil lain yang punya kepedulian sama. Yappika mendukung dan terlibat aktif dalam jaringan/koalisi advokasi di berbagai tingkatan (nasional dan wilayah) dalam rangka mendorong: pemberian akses dan kontrol yang lebih besar pada komunitas untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki; peningkatan partisipasi rakyat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan; dan pengguliran isu-isu pokok lain yang ditujukan untuk menjamin kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Dukungan-dukungan untuk proses Pemberdayaan Rakyat merupakan pilar ketiga strategi program Yappika. Dalam konteks pemberdayaan rakyat, Yappika menggunakan pendekatan integral, dengan jalan memadukan dukungan-dukungan untuk meningkatkan daya kritis dan kemampuan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses-proses politik dengan - peningkatan kapasitas masyarakat mengelola sumber daya alam yang mereka miliki, mengelola konflik-konflik antar mereka dengan pendekatan non-kekerasan, sekaligus mengelola sumber daya ekonominya secara mandiri. Pada dasarnya Yappika percaya pada ungkapan bijak seorang ahli ekonomi peraih nobel, Amartya Sen, bahwa “pembangunan” bermakna “kebebasan”: kebebasan bagi rakyat untuk menentukan pilihan-pilihan politik, kebebasan atas ketergantungan ekonomi, kebebasan dari penguasaan aset (sumber-sumber daya alam) hanya oleh pihak-pihak dan kepentingan-kepentingan tertentu, serta kebebasan dari kekerasan dan tekanan aparaturnegara dalam menetapkan pilihan-pilihan hidup.

Penyempurnaan Sistem pendukung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketiga pilar strategi program Yappika diatas. Yappika menyediakan fasilitas pelatihan-pelatihan, magang, dan asistensi teknis; baik ditujukan untuk meningkatkan kapasitas berorganisasi dan merancang



Keterbukaan dan pertanggungjawaban menjadi bagian penting dari program-program Yappika

program, maupun untuk meningkatkan keahlian di sektor-sektor tertentu. Yappika juga terlibat dalam riset-riset kebijakan dan riset-riset aksi bentuk lain, sekaligus menerbitkan buku-buku dan informasi dalam rangka mendorong diskursus tentang isu-isu pokok di negara ini. Tak kalah penting adalah penyediaan kesempatan bagi mitra-mitra dan “sahabat” Yappika, untuk saling berinteraksi, tukar-pengalaman, berjaringan dan membentuk koalisi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan mereka.

Melalui pendekatan holistik terhadap proses-proses pemberdayaan masyarakat sipil diatas, kami berharap, mampu memberikan kontribusi terhadap perwujudan masyarakat sipil yang

kritis dan bernas, yang berperilaku dan bertindak demokratis, punya independensi dan kemandirian terhadap tekanan berbagai pihak lain, sekaligus menghargai hak azasi manusia dan pluralisme.



## YTMI : Lahir, Tumbuh dan Berkembang Sekuat Tanaman Bakau

**T**anaman mangrove atau disebut juga tanaman bakau dikenal dengan ketangguhannya menghadapi hempasan ombak dan gelombang. Sayangnya kini hutan bakau di daerah Sulawesi Selatan semakin habis dibabat oleh orang tak bertanggungjawab dan memanfaatkannya menjadi tambak udang.

Sejak kelahirannya ditahun 1991, Yayasan Tumbuh Mandiri Indonesia (YTMI) sangat *prihatin* terhadap masalah kerusakan lingkungan pesisir laut. Ada dua target yang coba YTMI lakukan dan keduanya saling berkait, yakni membangkitkan kepedulian masyarakat atas lingkungan pesisir serta pengelolaan kawasan pesisir agar memberi manfaat bagi komunitas sekitarnya. Hubungan mutualisme antara lingkungan dan 35 kepala keluarga masyarakat dampingan di pesisir pantai Kuru-kuru terus terjalin dan telah berhasil memperluas serta memperbaiki sekitar 20 hektar lahan pesisir yang rusak.

Kemajuan di tingkat lapangan dirasa belum seimbang dengan proses kerusakan yang juga berjalan terus menerus. Abrasi air laut --akibat gundulnya hutan mangrove-- tidak bisa diselesaikan hanya dengan penanaman bakau oleh masyarakat setempat, tetapi perlu adanya kebijakan perlindungan hutan bakau dari pemerintah. YTMI sadar akan hal tersebut sehingga memperlebar upayanya dengan membangun relasi dengan pemerintah lokal. Melalui kegiatan pemetaan tata ruang pesisir laut, dialog interaktif, serta pembuatan Rancangan Perda (Peraturan Daerah) Pengelolaan Tata Ruang Pesisir & Laut, YTMI mencoba mempengaruhi para pengambil keputusan di tingkat lokal.



Tetap kokoh  
dihantam gelombang

Secara keseluruhan rancangan pengelolaan tata ruang tidak sepenuhnya diterima oleh pemerintah lokal, akan tetapi pengalaman tersebut sangat berharga bagi para aktivis YTMI dan masyarakat untuk tidak surut berjuang : *Pertama*, mereka menyadari bahwa upaya pembangunan kawasan pesisir yang ramah lingkungan tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi, tetapi perlu ada kolaborasi dari berbagai indikator mulai dari aspek konservasi, penguatan masyarakat, sosial-budaya, sosial-ekonomi dan sosial-politik. *Kedua*, pendekatan berbasis komunitas tidak cukup untuk melakukan perubahan jangka panjang, akan tetapi dibutuhkan suatu kerja yang langsung dilakukan oleh masyarakat untuk mengkritisi keberadaan peraturan-peraturan daerah sekaligus bukti keberpihakkan masyarakat pada lingkungan. Untuk melakukan hal ini peningkatan kapasitas sangat

dibutuhkan di tingkat komunitas dan Ornop itu sendiri. Keberhasilan yang lain YTMI telah memfasilitasi mandat/pesan masyarakat pesisir kepada penguasa setempat.

## LBH NUSRA : Transformasi Menuju Demokrasi

**B**agi kebanyakan aktivis di Maumere - NTT, menyebut LBH-Nusra identik dengan kegiatan advokasi. Berbasis pada pendekatan *legalitas* dan *litigasi*, LBH-Nusra dalam prakteknya melakukan berbagai aktivitas ditingkat masyarakat akar rumput. Pemetaan partisipatif, pendidikan hukum kritis sampai dengan dialog antar kampung merupakan kemas program yang dibangun LBH-Nusra. Landasan dari semua program yang dijalankan adalah sama yaitu, penerapan nilai-nilai demokrasi.

Pada saat implementasi program di masyarakat, LBH-Nusra masuk dengan gaya dan ciri khas-nya sendiri, yakni penuh dengan nuansa pembangkit semangat, LBH-Nusra mencoba melakukan pembelaan bagi kaum tertindas. Gaya dan ciri khas LBH-Nusra ini dengan cepat diadopsi oleh masyarakat yang '*dibela-nya*', salah satunya terjadi pada Masyarakat Adat Tara Gahar Taji Mosan, yang menjadi korban kebijakan tapal batas hutan lindung pada tahun 1984. Perluasan kawasan hutan lindung dari peraturan tahun 1932 ke kebijakan tahun 1984, berakibat kepada penghilangan hak atas tanah penduduk setempat.

Tuntutan Masyarakat Adat Tara Gahar Taji Mosan untuk pengembalian lahan yang pernah dikelola oleh masyarakat adat tersebut, merupakan awal masuknya pendampingan LBH-Nusra. Melalui media institusi adat, LBH-Nusra dan Masyarakat Adat Tara Gahar Taji Mosan membangun 'amunisi' menghadapi represi penguasa.

LBH Nusra mengemas programnya dalam bentuk dialog-dialog interaktif antara masyarakat dan penguasa, demonstrasi ke kantor DPRD Kabupaten Sikka, Dialog multi pihak, serta dialog dengan pemerintah Provinsi NTT (DPRD NTT dan Gubernur NTT). Secara legalitas pemerintah belum memberikan pernyataan untuk mengabulkan permohonan masyarakat tetapi perjuangan Masyarakat Adat Tara Gahar Taji Mosan tidak pernah surut.



Nilai-nilai demokrasi di tingkat akar rumput

Pelajaran berharga yang dapat ditarik dari proses pendampingan LBH-Nusra, *pertama* jenis pendekatan yang sangat monoton (hanya melalui tekanan-tekanan) dan tidak mendapat dukungan dari elemen lainnya, akan berakibat pada peningkatan resistensi penguasa. Karena itulah LBH Nusra mengembangkan strategi yang terpadu, selain melakukan tekanan juga melakukan dialog-dialog dan membangun opini publik, *kedua* masyarakat memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan atas kepentingannya sendiri. Buktinya masyarakat lebih memilih untuk membangun Serikat Petani se-Kabupaten Sikka daripada terlibat dalam program HKM (Hutan Kemasyarakatan) yang merupakan produk penguasa. Sebagai akibat dari dukungan pada komunitas Masyarakat Adat Tara Gahar Taji Mosan, LBH Nusra telah melakukan pendidikan tentang nilai-nilai demokrasi di tingkat akar rumput yang langsung diterapkan oleh masyarakat dampingannya.

## SANLIMA : Belajar dari Krisis

**K**risis ekonomi berkepanjangan yang dialami oleh penduduk Indonesia ternyata juga dirasakan oleh sebagian besar masyarakat NTT khususnya di Kodya Kupang. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang memadai. Keadaan ini semakin memperburuk kondisi perekonomian penduduk setempat dan juga berakibat pada merosotnya tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat. Merespon keadaan ini suatu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan sosial dan ekonomi membentuk sebuah lembaga yaitu Yayasan Peduli Sesama disingkat dengan nama Sanlima. Sebagai wujud nyata kepedulian Sanlima terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, Sanlima mendorong pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUB).

Kelompok yang dibina beranggotakan orang-orang yang memiliki usaha produktif seperti pedagang sayur, pedagang kelontong dan pedagang buah. Pelatihan dan bimbingan teknis tentang manajemen organisasi, administrasi kelompok serta pengelolaan usaha, menjadi titik awal Sanlima dalam membangun kelompok. Pengetahuan ini selanjutnya dikembangkan dengan pembentukan kelompok usaha bersama simpan pinjam, melalui pertemuan rutin sebulan sekali dimana modal kolektif mulai dikumpulkan.

Kenyataannya, modal yang dihimpun kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan modal anggotanya sehingga Sanlima membantu dengan memberikan kredit. Selama periode kredit, kegiatan pendampingan secara rutin terus dilakukan baik pada kelompok maupun anggota kelompok yang menerima dana kredit, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa kredit itu aman bagi lembaga dan bisa memberikan keuntungan bagi peminjam.

Dukungan Yappika bukan hanya dalam bentuk dana kredit tetapi juga dalam peningkatan kapasitas baik staf maupun lembaga serta dorongan untuk berkelanjutan. Dalam perjalanan program yang sudah memasuki tahun ketiga, kini Sanlima semakin berkembang dengan program yang lebih luas, bukan lagi hanya program kredit tetapi juga aktif bergerak menggarap isu-isu demokrasi khususnya untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Diantaranya melakukan Pelatihan Penyusunan Draft UU dan Anggaran untuk kalangan legislatif (DPRD Kabupaten) se-wilayah NTT, serta Penguatan Otonomi pada Tingkat Desa.



Menyikapi krisis harus lebih kreatif

## YKF : Saatnya Suara Perempuan Didengar

“Jangan samakan Gender dengan kesetaraan , persamaan peran, emansipasi ataupun gerakan anti laki-laki”, kalimat ini, selalu terdengar dalam setiap pertemuan yang dilakukan Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) untuk menyakinkan Generasi Muda dan Pendamping Pesantren Nadhlatul Ulama (NU) di Yogyakarta tentang konsep Gender dan penerapannya

**P**erlu waktu memang, untuk menyakinkan sebuah konsep baru yang selama ini sudah mengakar kuat dan dinilai sangat bertentangan dengan kepercayaan dan nilai-nilai budaya. Namun perjuangan sekelompok perempuan muslim yang tergabung dalam YKF tak kunjung padam. Terjadinya perlawanan dari berbagai pihak tidak dijadikan sebagai kelemahan tetapi justru dijadikan sebagai kekuatan untuk tidak menyerah.

YKF mengawali kerjasama dengan Yappika dalam program “Peningkatan Kesadaran Gender pada Aktivis Muda NU”. Munculnya program ini akibat masih kentalnya semangat *subordinasi* perempuan yang berdampak pada kebijakan struktural di tingkat elit NU (suatu organisasi Islam terbesar di Indonesia) yang tidak melibatkan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan.

Setelah tiga tahun berjuang akhirnya hasil yang diperoleh luar biasa. Bukan hanya keterlibatan dan peran perempuan saja yang diterima oleh para pemimpin pesantren tetapi lebih dari itu, kini perempuan telah mendapat tempat dalam struktural elite di lembaga NU. Salah satu lembaga NU yakni Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) sekarang dipimpin oleh seorang perempuan, di beberapa pesantren sekarangpun banyak kita dengar suara perempuan yang menjadi penceramah baik di mesjid-mesjid maupun di pesantren, bahkan wacana tentang perspektif gender ini juga sudah sampai di tingkat cabang NU di Yogyakarta. Mereka harus mencoba untuk mendobrak tradisi NU yang sangat feodal dan konservatif.



Suara untuk perempuan

Dalam perjalanannya lembaga yang kritis terhadap implementasi dari tafsir Qur'an ini, tidak tinggal diam sehubungan akan diberlakukannya Undang-Undang Syari'at Islam di Aceh, YKF berkolaborasi dengan KKTGA-ACEH (salah satu LSM yang peduli terhadap isu gender yang juga merupakan mitra Yappika) berjuang untuk memasukkan beberapa pasal tentang peran perempuan dalam pelaksanaan Syari'at Islam, memberi kesempatan kepada perempuan untuk memperoleh pendidikan dan melakukan dakwah serta memasukkan definisi-definisi yang melibatkan perempuan. Sampai saat ini masukan-masukan untuk menambah pasal yang secara khusus melibatkan perempuan sedang dalam proses lobby kepada pengambil kebijakan, isu ini sekarang mulai berkembang dalam forum yang lebih luas. Kini suara perempuan telah mendapat tempat di lingkungan pesantren, NU bahkan pengambil kebijakan.



Visi YKF tentang kesetaraan gender

## Menakar Otonomi Komunitas : Monitoring untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sebagai bagian dari perubahan besar dalam desentralisasi di Indonesia UU Otonomi daerah telah mulai dilaksanakan Januari 2001. Dalam menyikapi pelaksanaan otonomi daerah, Yappika sejak setahun lalu sudah mulai melakukan kajian-kajian mendalam yang tidak hanya berhenti pada tataran wacana tetapi juga menorehkan wacana tersebut pada sebuah tulisan berupa manual. Manual yang disajikan tidak hanya bercerita mengenai apa itu otonomi daerah, bahkan lebih banyak mengulas apa itu otonomi komunitas.

Manual menakar otonomi komunitas, merupakan hasil kerjasama Program PPD YAPPIKA dengan CUSO dan dua orang tim penulis (Dani Wahyu Munggoro dan Andri Novy) yang melakukan penggalian data melalui FGD (Focus Group Discussion) di 4 (empat) wilayah ; Jakarta, NTT, Sulsel dan Yogya.

Ide penyusunannya merupakan rangkaian dari pandangan kritis Yappika atas lahirnya undang-undang mengenai otonomi daerah (sebelumnya telah dituangkan dalam bentuk position paper). Manual menakar otonomi komunitas lebih banyak mengulas tentang penilaian komunitas terhadap pelaksanaan otonomi daerah sebagai alat untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Untuk mempermudah penilaian, harus ada parameter yang jelas. Pendekatan yang digunakan dalam manual adalah pendekatan berjenjang yang terdiri dari : prinsip, kriteria, indikator serta dilengkapi dengan alat uji (*verifier*). Alat ukur tersebut melalui beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, yang meliputi : Focus Group Discussion (FGD), wawancara dan studi literatur.

Yappika sangat menyadari bahwa prinsip, kriteria dan indikator yang tersusun didalam panduan tersebut, masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu panduan menakar otonomi komunitas merupakan stimulan bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk tetap melakukan pemantauan dan monitoring atas pelaksanaan otonomi daerah yang berpihak pada rakyat.

Manual menakar otonomi komunitas, kami posisikan sebagai draft sehingga, sangat memungkinkan untuk dilengkapi, dirubah ataupun diganti oleh berbagai pihak sesuai dengan pandangan kritis rakyat terhadap pelaksanaan otonomi daerah diberbagai wilayah masing-masing sesuai dengan karakteristik daerahnya.



## Kehadiran Undang-Undang Yayasan Untuk Siapa?

Setahun terakhir berita mengenai Undang-undang (UU) Yayasan ramai diperbincangkan dalam media cetak maupun elektronik meskipun tidak sampai menjadi headline. Kemunculannya terkesan tiba-tiba dan prosesnya sangat cepat. Hanya dalam tempo 10 (sepuluh) bulan Rancangan UU Yayasan telah menjadi UU Yayasan.

Yayasan adalah badan hukum yang biasa dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi pro-demokrasi dan organisasi yang aktif dalam kegiatan sosial, termasuk organisasi non pemerintah (Ornop) dan organisasi-organisasi rakyat. Kehadiran RUU Yayasan tentu membawa implikasi pada Ornop, organisasi rakyat dan organisasi pro-demokrasi/sosial lainnya. Yappika merasa perlu terlibat aktif menyikapi kelahiran RUU ini dengan mengingat masih adanya kelemahan-kelemahan esensial dalam RUU Yayasan yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kebebasan warga negara untuk berserikat dan berorganisasi.

Yappika terpilih menjadi koordinator koalisi yang terdiri dari berbagai Ornop untuk melakukan kegiatan advokasi RUU Yayasan semasih di tangan DPR. Aktivitas yang dilakukan diantaranya lobby kepada anggota DPR yang tergabung dalam Pansus (Panitia Khusus UU Yayasan) untuk mendesakkan gagasan-gagasan koalisi, kampanye melalui media dan terakhir penyusunan kertas posisi (Position Paper).

Agenda aksi yang digulirkan oleh koalisi ditujukan untuk mendorong perubahan pada draft RUU yang dikeluarkan oleh pemerintah. Utamanya yang memuat pokok-pokok pikiran tentang: pengaturan kepengurusan internal (*internal governance*) sebuah yayasan; pengurangan campur-tangan pemerintah terhadap yayasan; kepastian apakah yayasan bisa berbisnis atau tidak; pengaturan sanksi bagi yayasan yang melanggar ketentuan UU; pengaturan mengenai pajak (pemotongan & pengecualian); serta persoalan transparansi dan akuntabilitas Yayasan.

Setelah melakukan advokasi dan lobby-lobby UU Yayasan akhirnya disahkan pada 6 Agustus 2001. Keberhasilan-keberhasilan yang dicapai Koalisi dalam usahanya memperbaiki RUU Yayasan antara lain adalah: pencantuman pasal tentang keharusan bagi sebuah yayasan untuk bersikap transparan dan akuntabel terhadap publik, dengan jalan melaporkan keuangannya lewat papan pengumuman atau media-media publik; dan pasal mengenai pemberlakuan sanksi bagi yang tidak memenuhi ketentuan.

Terlepas dari keberhasilan tersebut, masih ada pekerjaan rumah yang belum tercapai dari rangkaian aktivitas koalisi. Beberapa hal yang masih menjadi pekerjaan rumah pokok antara lain menyangkut aspek:

Sebagai lembaga yang masih Balita, Yappika boleh dikatakan tindakannya sudah melampaui usianya, atau dengan kata lain, Yappika telah tumbuh dewasa sebelum waktunya. Tentu saja untuk sebuah ukuran organisasi, yang bertindak telah melampaui batas usianya, bukanlah merupakan problem kejiwaan, tetapi merupakan sebuah prestasi.

Kiprahnya selama ini bak layaknya sebagai organisasi yang telah mapan dan telah lama berdiri. Kegiatannya berkesinambungan dan tertata dengan baik, urusan-urusan konsolidasi organisasi yang biasanya banyak menyita



Undang-Undang Yayasan:  
membelenggu kreatifitas sosial masyarakat

kewenangan pemerintah mengesahkan berdirinya sebuah yayasan lewat Menteri Kehakiman dan HAM, dan adanya pasal “karet” yang menyangkut hak pemerintah untuk membubarkan sebuah Yayasan atas dasar pelanggaran terhadap “ketertiban umum dan kesusilaan”. Koalisi beranggapan bahwa kewenangan pengesahan ditangan pemerintah punya implikasi pada hak pemerintah untuk tidak menerima berdirinya sebuah yayasan. Ini berarti pula pembatasan bagi berbagai kelompok masyarakat untuk berserikat dan berorganisasi atas kepentingan-kepentingan mereka. Seharusnya fungsi pemerintah terbatas pada “menerima pendaftaran” yayasan lewat pengadilan. Disisi lain, kata-kata “menggangu ketertiban umum dan kesusilaan” tidak didefinisikan secara jelas dan pada

prakteknya dapat menjadi alat legitimasi pemerintah untuk membubarkan organisasi-organisasi berbadan hukum yayasan yang mencoba melakukan kritik-kritik tajam atas kinerja pemerintah maupun melakukan aksi-aksi masa dalam rangka mendorong perubahan atas kebijakan pemerintah tertentu.

Adanya kelemahan-kelemahan UU Yayasan seperti disebut diatas dan keinginan untuk mendorong revisi atas

UU tersebut menyebabkan kerja koalisi untuk UU Yayasan terus berlanjut. Belajar dari "kegagalan" advokasi untuk UU Yayasan, beberapa agenda kerja di masa depan telah disusun diantaranya: melakukan penelitian dan menyusun database yayasan-yayasan yang berafiliasi pada perangkat negara yang akan dikelola oleh Yappika, melakukan pemantauan terhadap kinerja beberapa yayasan besar yang berafiliasi pada perangkat negara akan dikerjakan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), serta sosialisasi pemberlakuan UU Yayasan berikut dampaknya ke 6 (enam) wilayah : Aceh, Lampung, Yogya, Surabaya, Makassar & Banten yang dilakukan atas kerjasama Yappika dengan TIFA. Lobby-lobby ke anggota parlemen pun terus dilakukan dengan mengajak partisipasi berbagai komponen yayasan lain, seperti yayasan-yayasan panti asuhan, penyandang cacat, dan yayasan-yayasan pendidikan. Koalisi bersikap bahwa pengaturan terhadap organisasi berbadan hukum yayasan memang penting, namun pengaturan itu mesti tetap memberikan ruang yang cukup luas bagi warga-negara untuk berserikat dan berorganisasi, demi pengguliran kepentingan-kepentingan mereka di ranah publik pun pemberian pelayanan-pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat marjinal.

tenaga dan perhatian pada awal-awal berdirinya, nampak tidak menjadi hambatan yang berarti.

Untuk itu tugas terberat Yappika di masa datang lebih kepada memelihara momentum kemajuan organisasi serta melakukan inovasi-inovasi di masa depan. Dan tugas seperti itu bukanlah ringan, karena mengandalkan adanya regenerasi yang handal dan berkesinambungan. Tak ada kata lain selain mengucapkan selamat dan semoga sukses selalu.

Hendardi  
Ketua PBHI  
Jakarta

## Otonomi Khusus Bagi Papua

**K**onflik yang berkepanjangan di tanah Papua menurut para pengamat politik hanya dapat diselesaikan dengan Otonomi Khusus Papua. Wacana mengenai otonomi khusus ini sudah cukup lama berkembang di Papua. Ada proses metodologi yang berjalan cukup sistematis untuk mematangkan gagasan tersebut sehingga melahirkan Undang-undang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) yang disahkan pada 21 November 2001. Peran organisasi masyarakat sipil sebagai fasilitator tampak cukup signifikan. Salah satu lembaga non pemerintah yang mempunyai andil besar terutama dalam membangun dialog-dialog antar masyarakat selama proses penyusunan RUU Otsus Papua adalah salah satu lembaga mitra YAPPIKA yaitu Foker LSM Papua.

Dialog-dialog yang dibangun oleh Foker LSM Papua dengan komunitas masyarakat melalui seminar, talkshow radio dan TV lokal tidak saja merupakan jembatan komunikasi antar sesama masyarakat serta masyarakat dengan pemerintah, tapi juga merupakan pendidikan politik yang cukup efektif. Foker LSM Papua tentunya tidak sendiri, ada beberapa Ornop lainnya yang juga berperan aktif untuk melahirkan UU Otsus Papua tersebut. Akademisi yang diwadahi di dalam tim asistensi dan dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Cendrawasih, menjadi elemen yang berperan besar terutama dalam penyusunan naskah akademik serta draft RUU Otsus Papua. Di Jakarta, Yappika menyelenggarakan Seminar Sehari pada Oktober 2001, dengan harapan isu tersebut tidak menjadi khusus milik rakyat Papua yang ada di tanah Papua, tapi rakyat Papua yang juga berada di Jakarta.

UU Otsus Papua telah disahkan, beberapa kalangan bahkan cukup terperangah atas persetujuan pemerintah terhadap beberapa substansi yang jelas-jelas berpihak pada rakyat Papua. Sekalipun

UU Otsus Papua telah disahkan, tidak serta merta konflik yang telah cukup lama berlangsung segera selesai. Masih dibutuhkan proses pemantauan, monitoring dan evaluasi terutama oleh organisasi-organisasi pro- demokrasi, sehingga UU Otsus tersebut tidak hanya menjadi dokumen sejarah yang telah mengukirkan dengan indah nama pemerintah penguasa saat itu. Namun yang lebih penting dari itu, adalah dampak positif pemberlakuan UU tersebut terhadap hak masyarakat Papua.



Otonomi khusus menuju demokrasi



## Analisa Konflik Dan Membangun Perdamaian

**K**onsentrasi Yappika untuk program Resolusi Konflik tahun ini, terfokus pada usaha-usaha peningkatan kapasitas mitra-mitranya khususnya wilayah yang rawan konflik dan sarat dengan kekerasan yakni di Aceh, Papua, Ambon-Maluku dan Kalimantan Barat. Peningkatan kapasitas ini dilakukan dengan mengadakan pelatihan yang prosesnya dirancang dengan menggunakan alur : misi pendahuluan untuk menggali kebutuhan mitra dan menganalisis komponen-komponen masyarakat yang potensial dilibatkan dalam pelatihan - merancang pelatihan yang sesuai - pelaksanaan pelatihan dengan metode partisipatif - aksi lapangan untuk aplikasi dan praktek materi yang didapat dalam pelatihan - refleksi pemanfaatan dan penyusunan strategi aksi membangun perdamaian.



Wawancara dengan berbagai pihak: wakil dari kepolisian

Proses aksi-refleksi-aksi dalam pelatihan melalui konflik dan membangun perdamaian di atas ternyata cukup efektif untuk meningkatkan kapasitas mitra. Tidak saja karena ketersediaan kesempatan untuk mengaplikasikan berbagai metode yang diperoleh dalam pelatihan, namun juga pemberian kesempatan bagi mereka untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dengan wilayah lain tentang strategi-strategi membangun perdamaian dan reduksi konflik kekerasan.

Misi Pendahuluan : menggali kebutuhan mitra dan pemetaan konflik

Bekerjasama dengan Centre for the Studies of Violence and Reconciliation (CSV) Afrika Selatan, Yappika melakukan serangkaian misi pendahuluan ke Aceh, Kalimantan Barat, Ambon-Maluku

dan Papua dalam rangka menggali kebutuhan mitra-mitra atas pelatihan, sekaligus menganalisis komponen-komponen masyarakat yang potensial untuk diundang dalam pelatihan. Serangkaian wawancara dilakukan dengan berbagai stakeholder kunci antara lain : wakil kepolisian, wakil militer, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh etnis, Ornop, akademisi, kelompok mahasiswa dan wakil pemerintah.

Lokatih Dinamika Konflik dan Membangun Perdamaian Ketrampilan mengelola konflik agar tanpa kekerasan melalui kampanye Anti kekerasan dan dialog yang konstruktif, analisa potensi konflik dan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, pengelolaan strategi membangun perdamaian di wilayah perang, mengenali trauma yang dialami anak dan



Mengelola konflik tanpa kekerasan

remaja, dan perlindungan diri dari trauma untuk aktivis-aktivis HAM dan kemanusiaan di daerah konflik adalah beberapa materi yang disajikan dalam Lokalatih Dinamika Konflik dan Membangun Perdamaian yang diselenggarakan Yappika dan CSVR pada bulan Mei 2001.

Dalam lokalatih hadir peserta dengan berbagai latar belakang : aktivis HAM dan kemanusiaan, mahasiswa, tokoh masyarakat, jurnalis serta pengacara. Lokalatih yang dilakukan melalui pemberian sedikit teori dan lebih banyak refleksi atas konflik yang terjadi di wilayah masing-masing, memberi konteks permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing peserta. Perbandingan dengan pengalaman Afrika Selatan selama rezim apartheid dan dimasa transisi setelah keruntuhan apartheid memperkaya pengetahuan peserta yang terlibat dalam lokakalatih ini.

Untuk menerapkan pengayaan yang diterima, para peserta dari masing-masing wilayah melakukan satu kerja mengelola konflik di lapangan secara bersama-sama. Peserta dari latar belakang berbeda, bersatu dalam tim, saling berbagi dalam karya untuk mengurai konflik panjang yang terjadi. Setelah kegiatan di lapangan, di Bulan Agustus 2001 kembali para mantan peserta lokalatih dipertemukan dalam suatu pertemuan refleksi. Sharing dan evaluasi terjadi dalam kegiatan ini, termasuk juga menuliskan program kerja berjaringan bersama dimasa berikutnya.

#### Eksplorasi potensi dan pemicu konflik di Papua

Satu kegiatan eksplorasi potensi pemicu kekerasan sosial dan potensi pencegahannya telah dilakukan oleh mantan peserta lokalatih di Papua. Hasil eksplorasi ini sendiri telah disosialisasikan melalui sebuah forum diskusi dengan mempertemukan unsur Polri, TNI, birokrat sipil, Ornop, masyarakat adat, politisi, Presidium Dewan Papua, Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya (Foreri), Satgas dan pelaku ekonomi. Bekerja bersama stakeholder lain guna membangun saling pengertian dan kerja sama untuk kehidupan damai di Papua merupakan langkah penting dalam transformasi konflik yang tanpa kekerasan.

#### Bekerja bersama pengungsi di Kalimantan Barat

Konflik di Kalimantan Barat menyisakan perasaan getir para korban dan memaksa sebagian orang meninggalkan rumahnya untuk mengungsi. Masalah pengungsi atau disebut dengan Internally Displace Persons (IDPs) selain merupakan akibat konflik yang telah terjadi juga dapat memicu konflik baru. Relokasi, jadi salah satu alternatif pemecahan persoalan IDPs di Kalbar ini. Namun, para IDPs sudah begitu alergi dengan kata relokasi, karena pengalaman atas ketidaklayakan sarana dan prasarana yang diberikan di wilayah relokasi. Untuk itu workshop relokasi, analisa sosial di tempat



Anak-anak pun ikut menjadi pengungsi

relokasi, dan investigasi dana relokasi dilakukan oleh para mantan peserta lokalatih dari Kalimantan Barat, dalam rangka menjawab kegentingan permasalahan yang ada. Selain itu, dilakukan pula seruan anti kekerasan lewat poster, dialog kebudayaan dan agama, bekerjasama dengan radio setempat dengan tujuan agar tercipta rekonsiliasi dan hidup damai, dengan memberikan toleransi terhadap perbedaan yang ada.

Menghidupkan kembali institusi masyarakat untuk mendorong perdamaian di Ambon (BakuBae!)

Bulan Juni 2001 mantan peserta lokalatih dari Ambon mengadakan serangkaian pertemuan dengan para latupatti (raja-raja) se-kecamatan Leihitu dan Baguala dan pertemuan dengan pimpinan pemuda pelaku ekonomi sekecamatan Jasirah Leihitu dan Baguala. Dua kegiatan ini bermaksud untuk menghidupkan kembali peran institusi adat, pemuda dan pelaku ekonomi sebagai motor penggerak BakuBae dan membangun kembali interaksi dari dua komunitas yang bertikai, Muslim dan Kristen. Mendekatkan kembali masyarakat yang terbelah suatu kerja yang tak kunjung usai.

*“Tumbuh bersama mitra”*. Ini kesan yang langsung muncul ketika kami diberi kesempatan memberikan satu dua komentar bagi kepentingan penyusunan laporan tahunan YAPPIKA. Sebagai lembaga yang relatif baru, kami merasakan dukungan yang begitu besar dari YAPPIKA yang menyertai perkembangan lembaga kami.

Yayasan Peduli Sesama (Sanlima) sebuah LSM lokal di Kupang Nusa Tenggara Timur telah bekerja dengan YAPPIKA sejak Juni 1999, khususnya dalam program CBED. Dalam kurun waktu tersebut kami mencatat, YAPPIKA telah menerapkan satu strategi kerja jangka panjang dan komprehensif yang sangat membantu perkembangan lembaga mitra.

Kemitraan yang dibangun dengan lembaga-lembaga mitra sangat bertanggung jawab, karena kemitraan itu tidak hanya berkembang dalam rangka implementasi program, tetapi juga termasuk membuka diri terhadap tawaran kerjasama dari mitra di luar kesepakatan kerjasama sebelumnya. Kesan ini sangat mendalam ketika YAPPIKA mewujudkan satu obsesi kecil kami, menerbitkan satu catatan kegiatan kami menjadi buku, satu hal yang cukup sulit dilakukan sebuah LSM lokal seperti kami.

Kesan menarik lain, YAPPIKA selalu menyertakan mitra dalam setiap kegiatan yang berfokus pada pengembangan staf, pendanaan alternatif, dll yang mengarah pada *institutional building* mitra. Semoga ke depan kemitraan ini tetap langgeng dan membawa pencerahan dalam upaya penguatan masyarakat sipil di Indonesia.

Blasius Urikame Udak  
Direktur SANLIMA  
Kupang

## Jangkauan untuk Perubahan: Kampanye dan Publikasi

**D**i tahun ini Yappika semakin aktif melakukan kampanye publik untuk memperoleh dukungan dari masyarakat luas yang menaruh perhatian pada demokrasi, pluralisme dan nilai-nilai HAM. Menerbitkan buku-buku yang laik jual merupakan suatu langkah menggalang dana untuk kebutuhan penerbitan berikutnya. Peluncuran buku, diskusi dan beberapa kegiatan lain yang masih erat kaitannya dengan misi Yappika menjadi langkah penting untuk memberi kesempatan pada masyarakat agar lebih peduli untuk apa Yappika hadir. Langkah lain adalah menerbitkan agenda tahunan bertema Pluralisme, sebagai sebuah produk publik yang dikemas secara apik, pun mampu menyampaikan pesan mendalam tentang penghargaan pada keberagaman dan pentingnya kesetaraan.

Kami sadar bahwa masih panjang jalan yang harus ditempuh menuju kemandirian. Namun kami selalu berbenah diri mencoba, mengkomunikasikan gagasan-gagasan tentang demokrasi pada publik secara lebih baik. Menjadi harapan, agar publik Indonesia menaruh perhatian yang lebih baik pada isu-isu demokrasi sekaligus melayangkan bantuannya pada organisasi-organisasi pro-demokrasi, dalam bentuk bantuan tenaga dan keahlian sebagai relawan, donasi berbentuk barang yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan organisasi, bahkan dukungan dana untuk menyelenggarakan program.



Yappika masih sangat membutuhkan bantuan anda semua, baik melalui dukungan moral, gagasan-gagasan dan pemikiran, serta sumbangan material. Yappika yakin akan kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan dana publik yang dipercayakan kepada kami, untuk mendukung berbagai aktivitas dalam rangka memperjuangkan terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis dan melakukan penegakan HAM dan kedaulatan rakyat; mendorong terjadinya proses transformasi sosial dan ekonomi berbasis masyarakat untuk mencapai tatanan yang adil, mandiri dan setara; mendukung segala upaya untuk menghapuskan bentuk-bentuk diskriminasi atas dasar agama, suku, ras dan gender untuk mewujudkan masyarakat yang plural.

**Lokakarya Kemandirian Organisasi Masyarakat Sipil: Mencermati Pilihan**

*Peningkatan kapasitas dan lembaga yang berkelanjutan* adalah dua kalimat yang sangat erat hubungannya dengan Kemandirian sebuah

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau lebih dikenal dengan sebutan Ornop. Mengingat selama ini Ornop sangat tergantung kepada lembaga donor dalam menjalankan perputaran roda organisasinya. Padahal tidak selamanya lembaga donor asing akan memberi dana kepada Ornop di Indonesia, belajar dari pengalaman Ornop di Filipina yang tiba-tiba ditinggalkan oleh Lembaga Donor Internasional sehingga dalam waktu singkat ratusan Ornop gulung tikar, kita tidak ingin hal serupa terjadi di Indonesia. Dasar ini merupakan salah satu alasan menyelenggarakan sebuah Lokakarya yang dilaksanakan oleh Organisasi Resource Alliance-UK di Bali pada Mei 2001 dimana Yappika terlibat aktif sebagai Steering Committee.

Yappika meminta beberapa mitra untuk ikut berpartisipasi dalam lokakarya ini, tujuannya tidak lain untuk memberikan kesempatan kepada Ornop mitra Yappika yang tertarik dalam penggalangan sumberdaya untuk bertemu, menjalin hubungan, berdiskusi, belajar dan berbagi pengalaman untuk kepentingan mereka bersama dalam melakukan penggalangan sumberdaya dari berbagai sektor. Peserta yang hadir umumnya dari wilayah Asia Pasifik dan pembicara yang ditampilkan bukan hanya dari Indonesia tetapi juga dari CRY India, PBSP Filipina, FOMCA Malaysia. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi salah satu pemicu bagi Organisasi Masyarakat

#### Peluang LSM untuk Membangun Masyarakat Sipil

Selama ini LSM-LSM yang menjamur belum cukup memadai untuk menghadapi persoalan yang berkembang di masyarakat. Sebenarnya semenjak masa Orde Baru LSM-LSM sudah harus melakukan evaluasi tentang perannya dalam perubahan masyarakat. Peran advokasi bersamaan dengan pembangunan Organisasi-organisasi massa rakyat serta institusi-institusi masyarakat yang demokratis seharusnya sudah dimulai semenjak masa itu. Sehingga sewaktu kekuasaan Orde Baru runtuh, masyarakat sudah cukup kuat untuk membangun secara kongkrit apa yang dinamakan *civil society* (masyarakat sipil). Sehingga setidaknya rakyat berkuasa secara kongkrit ditingkatkan lokal, pada saat rakyat kebanyakan tidak berkuasa ditingkatkan elite. Kenyataannya selama ini, dapat dikatakan banyak proyek-proyek LSM di Indonesia cenderung *wasting time and money*.

Peran LSM yang sekedar sebagai “pemadam kebakaran” harus dirubah menjadi *katalisator strategis* jangka panjang bangsa ini, sekaligus sebagai pemicu kekuatan-kekuatan alternatif untuk mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat.

Aristides Katoppo  
Pemimpin Umum  
Harian Sore Sinar Harapan

Saya melihat Yappika sudah melakukan perannya dengan *grand design* pemberdayaan ekonomi politik dan pendidikan politik bagi masyarakat. Dan saya berharap Yappika dapat menghadapi munculnya berbagai *tendensi politik* dalam masyarakat, baik yang demokratis, nasionalis, agama, sosial-demokrat maupun sosialis. Sudah seharusnya semua proyek dan program harus di letakkan pada satu *grand design* rakyat yang berdaulat !

Sipil di Indonesia untuk mulai memikirkan bagaimana menggalang sumber daya (dana, tenaga, barang, dll) dari masyarakat luas sebagai konstituennya.

Timur Barat dalam Damai : Dampak konflik terhadap sosio ekonomi di Aceh dan Papua

Aliansi inklusif merupakan aspirasi Yappika. Melalui peluncuran buku sebagai hasil studi yang dilakukan di Aceh dan Papua, Yappika menggalang aliansi diluar kalangan LSM. Sebanyak 100 orang terdiri atas kalangan swasta, pers, birokrat dan akademisi hadir dalam acara yang diselenggarakan pada bulan April 2001 di News Café Kuningan Jakarta. Kegiatan ini sebagai media untuk sosialisasi informasi tentang konflik yang



Konflik di Aceh dan Papua yang tak kunjung henti

Yappika - sebuah organisasi yang serius terhadap kemandirian keuangan

Hubungan saya dengan Yappika kebanyakan berfokus pada masalah-masalah kemandirian keuangan utk Ornop-ornop di Indonesia. Seperti yang diketahui oleh banyak orang, ornop di Indonesia sangat tergantung sekali kepada lembaga dana asing dan ketergantungan ini menjadi masalah pada diri ornop itu sendiri. Ornop tidak memiliki cara untuk mengetahui secara pasti situasi masa depan lembaga dana atau keuangannya di kemudian hari, hal ini dilihat oleh masyarakat Indonesia lainnya sebagai pihak yang dapat dimanfaatkan oleh kekuatan asing. Mereka juga dilihat oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agen asing yang menyuarakan kepentingan asing, disamping itu konstituen dan dukungan local tidak dapat dibangun karena ketergantungan kepada funding asing.

Sejak pertama mendiskusikan hal ini, Yappika menjadi yang terdepan -salah satu- sebagai anggota dalam kepanitiaan sebuah lokakarya besar pada April 2001 di Bali mengenai *Fundraising*, salah satu dari sedikit organisasi yang secara serius menanggapi ide ini dan membangun strategi kemandirian keuangan untuk lembaganya, dan yang membuat rencana untuk dijalankan. Saya mengingat dengan baik Yappika berusaha mencoba menggalang dana untuk berkontribusi pada dana yang dibutuhkan guna mengikuti pertemuan Civicus di Vancouver-Kanada; Yappika membuat suatu undian berhadiah dengan menyediakan hasil karya dari Indonesia untuk peserta konferensi.

Tak seorang pun menganggap bahwa masalah kemandirian keuangan merupakan suatu hal yang mudah bagi ornop di Indonesia, tetapi Yappika telah menjadi yang terdepan untuk ini, dengan mencari berbagai cara yang dapat mengurangi ketergantungan pada donor asing dan mendorong para anggota jaringannya (mitranya) untuk melakukan hal yang sama.

Richard Holloway  
Program Kemitraan  
untuk Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia UNDP  
Jakarta

terjadi secara berkepanjangan dan sudah menelan begitu banyak korban jiwa di Aceh dan Papua, kampanye untuk perdamaian di dua daerah tersebut harus dilakukan secara terus menerus.

Acara diskusi sekaligus peluncuran buku juga diisi dengan atraksi budaya dari Aceh lewat Musikalisasi Puisi oleh Sanggar Matahari dan slide show tentang Papua, dilanjutkan dialog interaktif dengan beberapa pakar menyoroti permasalahan konflik di Aceh dan Papua diantaranya adalah Daniel Dhakidae (Ketua Litbang Harian Kompas), Sri Adiningsih (Pengamat Ekonomi UGM - Yogya), Frans Maniagasi (Pengamat masalah Papua Jakarta) dipandu oleh Rosianna Silalahi (Anchor SCTV). Tema yang diangkat "Timur Barat dalam damai, dampak konflik terhadap sosio ekonomi di Aceh dan Papua". Melalui acara ini, Yappika mengkampanyekan persoalan di Aceh dan Papua agar menjadi persoalan seluruh lapisan masyarakat. Acara penutup menghadirkan Oppie Andaresta yang sudah cukup dikenal di kalangan anak muda dengan tembang lagu-lagu perdamaian.

#### Hari Hak Asasi Manusia Internasional Tahun 2001

Tahun ini untuk kedua kalinya Yappika bersama-sama dengan Ornop lain sepakat untuk menyelenggarakan Hari Hak Asasi Manusia 2001 dengan melibatkan berbagai kalangan diantaranya remaja dan pemuda yang merupakan gabungan dari berbagai sekolah di Jakarta, kalangan profesional, jurnalis, dan tidak ketinggalan aktivis Ornop.

Tak kurang dari 150 orang ikut terlibat dalam peringatan ini. Kebetulan perayaan Hari HAM tahun ini bertepatan dengan bulan puasa, sehingga seluruh acara diakhiri buka puasa bersama. Seluruh aktivitas dilakukan di Hotel Indonesia, diantaranya pemutaran film mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, serta penampilan dari Teater Ungu, diskusi paralel dimana pelajar membicarakan tentang toleransi dan Hak Asasi Manusia, para jurnalis membicarakan tentang isu pluralisme dan para Ornop berbicara tentang refleksi pelanggaran Hak

Asasi Manusia selama tahun 2001. Harapan diatas semua kegiatan ini adalah supaya setiap bangsa di dunia khususnya Indonesia bertanggungjawab dan menghargai Hak Asasi setiap Manusia.



Ketika remaja berbicara tentang Hak Asasi Manusia

Kampanye Pluralisme melalui Buku Agenda : Rayakan Keberagaman Kita ! Berbagai cara mendefinisikan pluralisme, perbedaan suku, kelas, agama, warna kulit, ideologi dan lain-lain tidak selayaknya selalu dipertentangkan, justru keberagaman itu menggambarkan suatu kekayaan yang menghasilkan keindahan. Menjelang akhir tahun Yappika menerbitkan sebuah buku Agenda harian yang mengangkat tema pluralisme : RAYAKAN KEBERAGAMAN KITA ! Sebagai bagian dari Masyarakat Sipil kami merasa ikut bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat sipil Indonesia yang demokratis, independen, mandiri dan menghargai pluralisme.



Transisi menuju demokrasi

### Penerbitan Buku : Indonesia Menapak Demokrasi

Dipenghujung tahun 2001 Yappika melakukan evaluasi perjalanan Reformasi yang telah berjalan selama 3 tahun dan secara khusus Buku Menapak Demokrasi merupakan evaluasi pemerintahan Megawati selama satu tahun roda pemerintahan berjalan. Bagaimana kalangan masyarakat sipil menyikapinya yang dituangkan dalam sebuah buku oleh beberapa aktivis dari kalangan perempuan, aktivis buruh, aktivis HAM, aktivis Anti Korupsi, dan lain-lain. Namun yang tak kalah penting dari buku ini adalah solusi yang ditawarkan untuk menuju Indonesia baru dengan pandangan jauh ke masa depan.



## Capaian Program

### A. 1. Program Pemberdayaan Masyarakat

- 1.519 anggota masyarakat (383 perempuan) meningkat ketrampilannya tentang pertanian berkelanjutan, pemerintahan lokal yang demokratis, hak-hak masyarakat tradisional, pengelolaan konflik dan pengelolaan terhadap sumber daya alam.
- Sedikitnya 229 staf dari mitra Ornop (70 perempuan) dilatih, dan sebagai hasilnya mereka meningkat kemampuannya untuk memfasilitasi masyarakat dampingan dalam berbagai kegiatan *fundraising*, analisis sosial, analisis peraturan daerah, melakukan investigasi HAM & analisis konflik.

### 2. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masyarakat

- Pada tahun ini, kredit usaha kecil sebesar Rp. 220,000,000 diberikan kepada beberapa kelompok masyarakat sebagai modal dalam melakukan kegiatan-kegiatan usaha kecil mereka. Tiga ratus lima puluh enam anggota kelompok masyarakat (376 perempuan) mendapat keuntungan langsung dari kredit tersebut.
- Aset-aset yang dimiliki kelompok masyarakat telah meningkat. Sebagai contoh, Yayasan Tengko Situru di Toraja-SulSel, selama empat tahun terakhir telah meningkatkan aset kelompok masyarakat sebesar 115%.

### 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat

- Masyarakat di wilayah Gunung Kidul berhasil merehabilitasi 42 hektar lahan tandus melalui penanaman pohon
- Para petani yang dibina oleh Agape, salah satu mitra Yappika di Yogyakarta, membuat dan menggunakan 26,5 ton pupuk organik.
- Beberapa kelompok masyarakat berhasil membangun lima unit keramba kepiting, yang dimanfaatkan untuk konsumsi mereka maupun untuk dipasarkan sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- Empat buah peta wilayah setempat berhasil dibuat oleh masyarakat melalui pemetaan partisipatif.

### 4. Pendidikan Masyarakat

- Komponen ini memberi dukungan kepada 135 kelompok masyarakat dengan jumlah anggota sebesar 1.213 orang (353 perempuan)
- 3.291 orang lainnya (1.263 perempuan) meningkat pengetahuan dan ketrampilannya tentang hak sipil dan politik sebagai akibat keterlibatan mereka dalam 170 kegiatan pendidikan
- Ornop di basis masyarakat dan kelompok masyarakat menyebarkan informasi mengenai berbagaimacam topik, mulai dari kesetaraan gender, konservasi lingkungan sampai pada

teknik-teknik pertanian organik. Informasi tersebut berupa buletin, leaflet dan talk show di radio. Sedikitnya 3.500 orang mendapat keuntungan dari informasi ini.

#### 5. Pelajaran Berharga

- Pengembangan program kredit harus dilakukan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk terjadinya akumulasi modal di tingkat masyarakat. Sangat penting untuk terus memantau perputaran dana di kelompok masyarakat supaya mekanisme dan strategi yang paling baik dalam pembayaran kredit dapat terus dikembangkan.
- Untuk menerapkan program yang terpadu pada sebuah lembaga, perlu dilihat kapasitas lembaga bersangkutan agar program yang dijalankan tidak melebihi kapasitas yang dimiliki. Dikhawatirkan, kelebihan beban akan menyebabkan lembaga tersebut tidak dapat melaksanakan programnya dengan baik, seperti penundaan kegiatan dan pelaporan.

### B. Advokasi

#### 1. Advokasi di Tingkat Nasional

- Yappika terlibat dalam 27 dialog dengan para anggota Parlemen, khususnya berkaitan dengan RUU Kebebasan Informasi, RUU Pemilu, RUU Politik, RUU Otonomi Khusus untuk Papua, dan RUU TCP3 (Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan).
- Bersama Koalisi Ornop untuk Konstitusi Baru, Yappika terlibat pada dua dialog dengan Komite Ad-Hoc MPR untuk merundingkan desain reformasi UUD '45.
- Empat masukan dari Koalisi Ornop untuk RUU Yayasan (dimana Yappika sebagai koordinator) telah berhasil diakomodasi dalam UU Yayasan yang disahkan DPR.
- Usulan JATAM, sebuah jaringan isu-isu pertambangan yang didukung oleh Yappika, mengenai penghentian pembuangan limbah pertambangan ke laut diterima oleh Menteri Lingkungan Hidup.
- Usulan untuk RUU Politik dimana Yappika terlibat di dalamnya mengenai Pemilihan Presiden secara langsung, menjadi agenda utama dalam pembahasan sidang tahunan 2001.

#### Pelajaran Berharga

Pelaksanaan dialog publik atau kegiatan advokasi mengenai isu-isu sensitif, seperti RUU Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan RUU Otsus Papua di Jakarta, harus dilakukan secara hati-hati, serta melakukan konsultasi intensif dengan berbagai pihak di dua propinsi tersebut. Jika tidak, potensi untuk memunculkan pandangan yang keliru dari berbagai pihak bisa membawa resiko fatal. Misalnya, bagi kalangan yang pro-kemerdekaan upaya-upaya ini bisa

dipandang sebagai cara untuk mendukung integrasi Aceh dan Papua melalui pemberlakuan otonomi khusus. Sementara itu, bagi kalangan yang pro-integrasi, upaya ini bisa dipandang sebagai salah satu cara mengkampanyekan pikiran-pikiran pihak pro-kemerdekaan dalam panggung nasional. Oleh sebab itu konsultasi dengan spektrum luas, multi-pihak dan posisi yang jelas harus dilakukan sebelum meluncurkan (*launching*) kegiatan-kegiatan apapun yang bertujuan untuk membahas isu-isu yang sangat sensitif.

## 2. Advokasi di tingkat Propinsi dan Forum/Jaringan Ornop

- Pada periode ini Yappika memberi dukungan terhadap lima forum/jaringan, yaitu: Foker-Papua; FSSM-NTT; FIK-SulSel; Forum LSM-DIY; dan Koalisi NGO HAM-Aceh.
- Tujuh belas dialog dilakukan, yang melibatkan 527 orang (101 perempuan) dari berbagai bidang, dan mendiskusikan berbagai hal sesuai dengan wilayah masing-masing. Misalnya: di Aceh dialog-dialog yang dilaksanakan Koalisi NGO HAM membahas mengenai alternatif penyelesaian konflik yang terus berlangsung; di Papua dialog diisi dengan pembahasan mengenai strategi hidup damai antara suku-suku asli Papua dengan suku pendatang.
- Selama periode ini, pelatihan diberikan kepada 158 staf Ornop (41 perempuan) dan mereka meningkat ketrampilannya dalam berbagai hal, misalnya : menganalisis peraturan otonomi daerah, melakukan investigasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM, dan analisa terhadap konflik.

### Pelajaran Berharga

Bertolak dari pengalaman kerjasama dengan YAPPIKA, telah terbangun kekuatan-kekuatan Forum khususnya secara politis di wilayah-wilayah gerakannya, meskipun masih pada tahap Propinsi. Untuk membuat Forum lebih efektif ada beberapa faktor yang perlu dikembangkan, yaitu: (1) Memperkuat posisi dan peran Forum sebagai jaringan advokasi; (2) Mobilisasi sumberdaya dan melakukan diversifikasi sumberdana; (3) Mengintegrasikan kawasan/region sebagai perspektif program; (4) Forum harus lebih membuka ruang bagi partisipan untuk mewujudkan perpektif gender, HAM dan lingkungan; (5) Mendorong munculnya institusi fasilitator, terutama untuk menjalankan peran fasilitasi; (6) terus mengembangkan jaringan serta gerakan rakyat lainnya.

## Hibah & Proyek yang Keluar Tahun Anggaran 2001/2002

### *Dispersed Grants & Projects Fiscal Year 2001/2002*

#### Penguatan Forum LSM / NGO Forum Strengthening

Forum LSM DIY (Yogyakarta)

Rp. 115,689,382

Memperkuat kegiatan Forum dengan kegiatan advokasi dan lobby, pendidikan hak politik masyarakat, pertemuan rutin, pelayanan terhadap mitra, dan dana operasional.

*To strengthen the NGO Forum to conduct advocacy and lobby activities on a wide range of issues, provide civic education training to member organizations, conduct routine member meetings, provide services to members and to contribute to operational costs.*

FIK-Ornop Sulawesi Selatan (Makassar)

Rp. 136,545,948

Memperkuat kegiatan Forum dengan kegiatan advokasi dan lobby, dialog kebijakan dan publik, pendidikan hak politik masyarakat, seminar tentang otonomi daerah, pertemuan rutin, pelayanan terhadap mitra, dan dana operasional.

*To strengthen the Forum to conduct advocacy and lobby activities, disseminate information, facilitate civic education, implement a seminar on regional autonomy, provide services to members, and operational costs.*

FSSM-NTT (Maumere)

Rp. 213,462,730

Memperkuat kegiatan Forum melalui kampanye, memberi pendidikan hak politik masyarakat, melakukan pertemuan rutin, pelayanan terhadap mitra, dan pelatihan terhadap kepemimpinan yang baik serta dana operasional.

*To strengthen the Forum in East Nusa Tenggara to conduct campaigns, provide civic education, hold regular members meetings, conduct seminars on various issues, such as indigenous land rights in NTT, provide service to members, conduct workshops on effective leadership and contribute to operational costs.*

Foker LSM-Papua (Jayapura)

Rp. 118,256,345

Memperkuat kegiatan Forum melalui kampanye untuk rekonsiliasi dan membangun perdamaian antar etnis, melakukan pertemuan rutin, pelayanan terhadap mitra, serta dialog publik dan dana operasional.

*To strengthen Forum activities in West Papua to campaign on peaceful reconciliation of conflict between different ethnic groups, hold regular member meetings, provide services to the members, facilitate public dialogues and contribute to operational costs.*

Koalisi NGO HAM (Banda Aceh)

Rp. 91,093,987

Memberi dukungan terhadap para Ornop, penggalian rumusan resolusi konflik, melakukan dialog dan pertemuan antar berbagai pihak untuk mencari penyelesaian konflik di Aceh.

*To assist the Forum in providing support to other NGOs, identify conflict resolution strategies, and hold dialogues and meetings between various stakeholders in order to identify potential solutions to the on-going conflict in Aceh.*

Pendidikan Masyarakat / Community Education

SANRES NTT (Maumere)

Rp. 68,656,794

Program meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan advokasi kebijakan terhadap isu-isu pengelolaan sumber daya alam di NTT.

*For the program to increase the community's ability to conduct policy advocacy on issues related to community-based natural resource management in East Nusa Tenggara.*

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nadhlatul Ulama D.I. Yogyakarta (LKPSMNU DIY) (Yogyakarta)

Rp. 69,461,275

Program untuk mengembangkan kesadaran kritis dalam masyarakat melalui seni budaya pesantren.

*For the program to develop the critical awareness of the community through the use of Islamic Pesantren art and culture.*

Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) (Yogyakarta)

Rp. 27,605,050

Program penyadaran gender untuk aktivis pemuda Nahdatul Ulama-Yogyakarta.

*For the gender awareness program targeting youth members of Nahdatul Ulama (a mass-based Islamic organization) in Yogyakarta.*

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Nusra (LBH Nusra) (Maumere)

Rp. 29,430,000

Program pemetaan partisipatif untuk mendukung kegiatan advokasi dan melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

*For the program to conduct participatory community mapping to enhance advocacy work and involve indigenous communities in natural resource management.*

Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA) (Banda Aceh)

Rp. 53,517,585

Program pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan gender.

*For the program to provide education and increase community awareness about gender inequality.*

Jaringan Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat (SULO) (Banda Aceh)

Rp. 87,706,910

Program pengembangan dan penguatan organisasi tani Aceh melalui pendidikan dan penerbitan media alternatif.

*For the program to empower and strengthen farmer organizations by providing education and through the publication of an alternative media developed by farmers for farmers.*

Yayasan Bina Sejahtera (YBS) (Lembata)

Rp. 58,086,513

Program membangun pemerintah lokal yang demokratis dalam fokus membangun pemerintah desa dan badan perwakilan desa di Kabupaten Lembata.

*For the program to build democratic local governance, by focusing on building a village-level government and village representative body in Lembata Regency, NTT.*

Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) (Bulu Kumba)

Rp. 51,503,000

Program penguatan organisasi masyarakat sipil dalam era otonomi daerah di Kabupaten Bulu Kumba Sulawesi Selatan.

*For the program to strengthen civil society organizations in the context of regional autonomy in Bulu Kumba Regency, South Sulawesi.*

Yayasan Pengembangan Bambu Flores (YPBF) (Maumere)

Rp. 156,651,800

Program konservasi keanekaragaman hayati melalui program radio komunitas untuk memberi pendidikan lingkungan hidup dan advokasi hak-hak petani dan hak atas sumber daya alam.

*For the biodiversity conservation program, using community radio as a media to provide environmental education and advocate on issues related to user rights of natural resources and farmers rights.*

Yayasan Lembaga Konsumen-Sulawesi Selatan (YLKSS) (Makassar)

Rp. 24,513,643

Studi kasus yang bertujuan untuk mempromosikan perencanaan anggaran yang bersifat partisipatif dan transparan di Kabupaten Pangkep, Sul Sel.

*To conduct a case-study aimed at promoting district-level budget planning that is more participatory and transparent in Pangkep, South Sulawesi.*

Yayasan Peduli Sesama (SANLIMA) (Kupang)

Rp. 7.500.000

Menerbitkan buku yang berjudul "Mengembalikan Kedaulatan Rakyat".

*To publish a book entitled "Mengembalikan Kedaulatan Rakyat" (Return People's Sovereignty).*

LAPERA (Yogyakarta)

Rp. 20,668,000

Program Pendidikan Masyarakat Sipil di sekitar pedesaan wilayah Yogyakarta.

*To provide civic and political education to villages throughout the Yogyakarta region.*

Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat/

Community-based Natural Resource Management

Yayasan Tumbuh Mandiri Indonesia (YTMI) (Makassar)

Rp 66,000,000

Program konservasi pohon bakau serta mendukung kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat.

*For the program aimed at conserving and rehabilitating mangrove forests in various coastal communities surrounding Makassar, South Sulawesi, as well as to provide new economic opportunities for the communities.*

Yayasan Bina Sejahtera (YBS) (Lembata)

Rp 71,871,000

Program pengembangan pertanian terpadu untuk 10 desa di pulau Lembata-NTT.

*For the program to develop integrated farming in 10 villages on Lembata Island, NTT.*

Yayasan Lembaga Konsumen-Sulawesi Selatan (YLKSS) (Makassar)

Rp 31,700,000

Program perkembangan pertanian organik sayur-sayuran di sekitar kota Makassar.

*For the program to develop organic vegetable farming initiatives and assist with product marketing for several areas surrounding the city of Makassar.*

Yayasan Hivlak (Tual)

Rp 111,912,500

Untuk program hukum dan pendidikan lingkungan untuk masyarakat di daerah pesisir di pulau Kei Kecil, Maluku Tenggara.

*For the legal rights and environmental education program targeting indigenous coastal communities located on Little Kei Island, Maluku.*

Yayaan Bina Mandiri (YBM) (Ende)

Rp 40,071,590

Program pengembangan pertanian terpadu di Ende-NTT.

*For the program to develop community-based integrated farming in Ende, NTT.*

Yayasan Karya Swadaya (YKS) (Maluku Tenggara)

Rp. 8,333,000

Kontribusi terhadap program agro-forestry untuk membantu melindungi sumber daya alam.

*To contribute to developing an agro-forestry system as a means of helping to conserve natural resources in Southeast Maluku.*

Yayasan Satyapila (Aceh Tenggara)

Rp 23,457,794

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara keberlanjutan.

*To assist with community empowerment activities and increase community skills needed to manage natural resources sustainably.*

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia-Papua (PKBI) (Jayapura)

Rp 68,491,069

Program pengembangan tanaman obat-obatan serta memperkuat kearifan local di Jayapura-Papua Barat.

*For the program to develop a traditional medicinal garden, while at the same time helping to preserve traditional indigenous knowledge in Jayapura District, West Papua.*

Yayasan Agape (Yogyakarta)

Rp 32,000,000

Program usaha untuk memulihkan kesuburan lahan pertanian dan peningkatan pendapatan petani melalui budidaya tanaman jarak dan empon-empon di Dusun Pudak-Yogyakarta.

*For the program to restore soil fertility and increase farmers' income by cultivating jarak and empon-empon plants in Pudak village, Yogyakarta.*

Yayasan Paramitha (Malang)

Rp. 13,232,149

Diskusi untuk melihat isu-isu yang berkembang di Jawa Timur sekaligus melihat spektrum Ornop di wilayah tersebut.

*For a discussion on assessing the pressing issues in East Java, as well as, assessing the spectrum of civil society organizations in this region.*

ELTAYASA (Bukittinggi)

Rp. 25,066,400

Lokakarya untuk mendiskusikan isu otonomi daerah sekaligus melihat spektrum Ornop di daerah Sumatera Barat.

*To support a seminar to discuss the issue of regional autonomy and assess the spectrum of civil society organizations in West Sumatra.*

Pembangunan Ekonomi Berbasis Masyarakat/  
Community-based Economic Development

BEKATIGADE (Yogyakarta)

Rp. 104,902,750

Program untuk pemberdayaan perempuan melalui dukungan terhadap usaha kecil, fasilitasi jaringan antara sesama kelompok usaha perempuan.

*For the program aimed at empowering women by supporting the development of small business enterprises for women and facilitating networking among women's business groups.*

Yayasan Tengko Situru (YTS) (Tana Toraja)

Rp. 76,930,000

Program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan untuk membangun usaha kecil, untuk usaha petani sutera.

*For the program to increase community welfare by assisting communities to develop small enterprises, such as silk-farming businesses.*

WALDA (Tana Toraja)

Rp. 6,900,000

Kontribusi program yang bertujuan untuk membantu komunitas lokal dan menghimpun sumber daya ekonomi.

*To contribute to the program aimed at assisting local communities to accumulate economic resources.*

Yayasan Membagi Kasih (YMK) (Atambua)

Rp. 45,900,000

Program untuk bantuan kelompok usaha kecil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta membangun jaringan usaha kecil tersebut.

*For the program to assist small groups to increase their economic welfare through the development of a small business network that produces mattresses.*

Yayasan Agape (Yogyakarta)

Rp. 3,800,000

Dukungan akhir untuk 2 tahun program yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan perempuan dan membangun skema kredit serta aktivitas peningkatan kapasitas.

*Final contribution for a two-year program aimed at generating women's income through the development of a credit scheme and capacity building activities.*

Yayasan Bina Mandiri (YBM) (Fak-Fak)

Rp. 13,188,000

Bantuan untuk membangun usaha kecil dan koperasi lokal di Fak-fak Papua Barat.

*To assist with the development of small enterprises and local cooperatives in Fak-Fak, West Papua.*

Yayasan Peduli Sesama (SANLIMA) (Kupang)

Rp. 11,860,000

Meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui skema kredit dan usaha koperasi kredit.

*To increase community welfare by developing community credit unions and credit schemes.*

YAKARMANI (Tual)

Rp. 36,545,000

Program untuk menghasilkan pendapatan komunitas lokal dan membangun skema kredit komunitas di Tual - Maluku.

*For the program to generate local community income and develop community credit schemes in Tual, Maluku.*

LEKMAS (Makassar)

Rp. 13,031,500

Penguatan serikat pekerja (buruh) melalui dukungan usaha kecil di Makassar-Sulawesi Selatan.

*To encourage small business development amongst construction workers in Makassar, South Sulawesi.*

Yayasan Daur Ulang Aceh (YADUA) (Banda Aceh)

Rp. 9,900,000

Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui usaha daur ulang dan skema kredit kelompok.

*For the program aimed to increase the welfare of scavengers and develop a credit scheme among groups.*

Yayasan Bina Sejahtera (YBS) (Lembata)

Rp. 40,000,000

Membangun koperasi lokal dimana para petani mempunyai toko untuk memasarkan hasil pertanian mereka dan meningkatkan kesejahteraan komunitas.

*To develop a local cooperative so that farmers would have an outlet to market their agricultural products and other goods, as well as, to increase community welfare.*

Dialog Kebijakan Nasional / National Policy Dialogue

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) (Jakarta)

Rp. 65.500.000

Meningkatkan partisipasi publik dalam kegiatan advokasi untuk proses pembuatan kebijakan tentang pertambangan.

*To assist the Mining Advocacy Network (JATAM) to increase public participation in advocating for sound mining policies.*

SAMAK Aceh (Banda Aceh)

Rp. 60.955.000

Meningkatkan transparansi penggunaan APBN untuk kemanusiaan dan pembangunan untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat Aceh.

*For a program aimed at increasing the transparency surrounding the use of state funds for humanitarian and development purposes in order to increase the standard of living of the Acehnese people.*

SAMAK Aceh (Banda Aceh)

Rp. 23.467.000

Seminar tentang tranparansi APBN dan perencanaan strategis.

*Used to conduct a public seminar on state budget financial transparency and to conduct strategic planning.*

Forum Perjuangan Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA)

Rp. 2.000.000

Kontribusi pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kasus Aceh melalui kampanye di Jakarta yang terdiri atas pameran foto dan seminar dengan tema "Dua Hari Bersama Rakyat Aceh".

*Contributed to an activity aimed to raise public awareness about the problems in Aceh by campaigning in Jakarta through a photo exhibition and public seminar called "Two Days with the People of Aceh".*

WALHI Kalimantan Selatan (Banjarmasin)

Rp. 8.100.000

Dialog interaktif untuk konflik resolusi atas sumber daya alam di Kalimantan Selatan.

*To conduct an interactive dialogue to promote conflict resolution over natural resources in South Kalimantan.*

Bina Desa (Jakarta)

Rp. 2.000.000

Dukungan logistik untuk mendukung aksi petani untuk mendorong reforma agraria.

*To provide logistical support for a mass demonstration in Jakarta where farmers came from several places in Indonesia to advocate for agrarian reform.*

LPIST (Jakarta)

Rp. 3.000.000

Seminar publik untuk merefleksikan kinerja Presiden Megawati yang berjudul: Suara dari Arus Bawah: 100 Hari Pemerintah Megawati:

*To contribute to a public seminar to reflect on President Megawati's performance entitled: "Voices from the Bottom: One Hundred Days of Megawati's Government"*

Kontras (Jakarta)

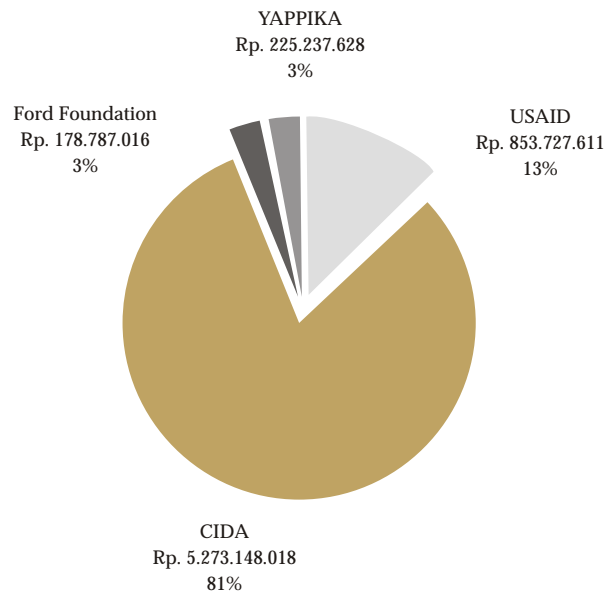
Rp. 2.000.000

Kampanye publik tentang Maluku yang sedang berada dalam situasi konflik, tema kampanye adalah: "Kembalikan Maluku Kami".

*To support a public campaign to promote peace-building in the conflict stricken region of Maluku. The campaign theme was "Return Our Maluku".*

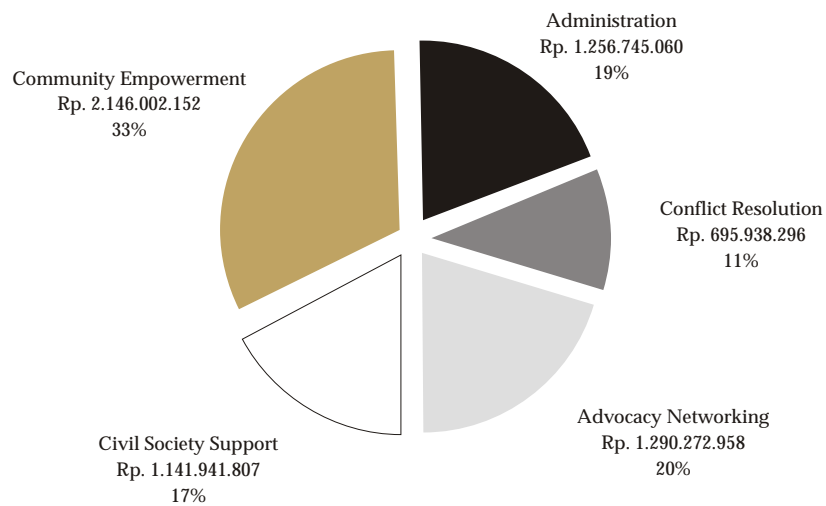


## SOURCES OF YAPPIKA FUNDING April 2001 - March 2002



TOTAL: 6.530.900.273

## PROGRAM EXPENDITURES April 2001 - March 2002



TOTAL: 6.530.900.273